

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1. Kajian Pustaka

##### 2.1.1. *Corporate Governance*

##### 2.1.1.1. *Pengertian Corporate Governance*

Pengertian *corporate governance* amat beragam. Pada dasarnya dapat diartikan sebagai tata kelola yang berhubungan dengan masyarakat. *Cadbury Committee* (2003) dalam Zarkasyi (2008) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.”

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 dalam Surya dan Yustiavandana (2008) *corporate governance* adalah suatu proses dari stuktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Menurut *Forum For Corporate Governance* (dalam Ujiyantho, 2007) *Corporate Governance* adalah: "...seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan *stakeholder* internal maupun eksternal lain, mengenai hak dan kewajiban mereka atau sistem dimana perusahaan diatur (*directed*) dan dikendalikan (*controlled*), dengan tujuan *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder*".

Secara definisi, *Good Corporate Governance* diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*-nya. Untuk itu ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan. Pemegang saham mempunyai hak untuk memperoleh semua informasi secara akurat dan tepat waktu (Sulistyanto, 2008:12).

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah:

1. "Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham dan para *Stakeholder* lainnya.
2. Suatu sistem *check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang pengelolaan yang salah dari penyalahgunaan *assets* perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan tujuan kinerjanya".

Selain itu juga dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan pula yang dimaksud *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur,

mengelola, mengawasi, memelihara dan memperhatikan kepentingan *stakeholder* dan kepentingan perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan dalam *Good Corporate Governance* berusaha untuk dapat menyeimbangkan pencapaian tujuan masyarakat dan tujuan ekonomi. Tantangan dalam *Corporate Governance* adalah mencari cara untuk memaksimalkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa, sehingga tidak membebankan biaya yang tidak patut kepada masyarakat luas umumnya.

### **2.1.1.2 Prinsip-prinsip Corporate Governance**

*Good Corporate Governance* adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, terdapat prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Menurut Sedarmayanti (2012:55), terdapat 5 prinsip *corporate governance*, yaitu:

1. “Transparansi (*transparency*).  
Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama.
2. Akuntabilitas (*accountability*).  
Prinsip akuntabilitas erat kaitannya dengan fungsi pengendalian. Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan direksi independen, dan komite audit.
3. Responsibilitas (*responsibility*).

Responsibilitas diartikan sebagai tanggungjawab perusahaan untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

4. Independensi (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*).

Maksud dari prinsip kewajaran adalah adanya jaminan hak-hak, perlakuan yang sama antar pemegang saham, baik itu pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas. Termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak”.

Agar semua prinsip-prinsip yang tercakup tersebut dapat diterapkan secara efektif dan efisien diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian yang memadai dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Pengawasan dan pengendalian ini dapat terlaksana dengan baik apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai independensi dengan kepentingan manajer perusahaan. Artinya, orang-orang ini tidak mempunyai ikatan kepentingan yang dapat mengakibatkannya tidak bebas dari tekanan dan intervensi manajerial. Seluruh tindakan dan keputusan yang dibuatnya harus lepas dari kepentingan manajer, apalagi jika hal itu menyangkut kepentingan *stakeholder*.

### 2.1.1.3 Tujuan *Corporate Governance*

Tujuan utama *good corporate governance* seperti yang dinyatakan dalam OECD (2004:13) adalah :

1. “Untuk mengurangi kesenjangan (*gap*) antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan (pemegang saham mayoritas dan pemegang saham lainnya).
2. Meningkatkan kepercayaan bagi para investor dalam melakukan investasi.
3. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*).
4. Meyakinkan kepada semua pihak atas komitmen legal dalam pengelolaan perusahaan.
5. Menciptakan nilai bagi perusahaan termasuk hubungan antara *parastakeholders* (kreditur, investor, karyawan perusahaan, *bondholders*, pemerintah dan *stakeholder*)”.

#### 2.1.1.4 Manfaat *Corporate Governance*

Suratman (2000) dalam Muchamad Danu Septiyanto (2012) menyatakan bahwa *good corporate governance* baik, maka GCG akan mempunyai manfaat antara lain:

- a) “Entitas bisnis akan menjadi efisien
- b) Meningkatkan kepercayaan public
- c) Menjaga *going concern* perusahaan
- d) Dapat mengukur kinerja target manajemen
- e) Meningkatkan produktivitas, dan
- f) Mengurangi distorsi (*manajemen risk*)”.

Pentingnya *Good Corporate Governance* menurut Hary Tanoesudibjo (2000) dalam Afnan (2014) yaitu:

1. “Menumbuhkan kepercayaan investor baik asing maupun domestik pada pasar modal Indonesia.
2. Sebagai acuan investor dalam melakukan evaluasi sebelum mengambil keputusan investasi.
3. Perlindungan kepada investor.
4. Pelaksanaan *good corporate governance* sebagai titik tolak perbaikan budaya kerja perusahaan ke arah baik”.

### 2.1.1.5 Mekaniseme *Corporate Governance*

Menurut Bambang Listyo Purnomo (2013) mekanisme *Good Corporate Governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *good corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Walsd dan Seward, 1990 dalam Arifin, 2005).

Menurut Boediono (2005) mekanisme *good corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah *agency*. Maka untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi konflik kepentingan (*conflict of interest*) tersebut.

Menurut Sulistyanto (2008:32) mekanisme *good corporate governance* adalah: "...suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham dan para *Stakeholder* lainnya".

Ada beberapa mekanisme *corporate governance* yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manajemen laba, diantaranya adalah konsentrasi kepemilikan, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit. Adanya konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan akan membuat pemegang saham ada pada posisi yang kuat. Hal ini menunjukkan

bahwa pemegang saham memiliki kendali terhadap manajemen untuk menuntut mereka melaporkan laporan keuangan secara akurat. Sama halnya dengan peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehinggadapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005).

Komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka *control* terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflikkeagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisasi (Andri dan Hanung, 2007). Ini membuktikan bahwa mekanisme *corporate governance* mampu mengurangi adanya praktik manipulasi terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer. Praktik manipulasi tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba.

#### **2.1.1.5.1 Dewan Komisaris Independen**

##### **2.1.1.5.1.1 Pengertian Dewan Komisaris Independen**

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2004) dewan komisaris independen adalah: "...anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak

semata-mata demi kepentingan perusahaan”.

Menurut Samsul (2006:72) dewan komisaris independen adalah”...anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris lainnya, anggota dewan direksi,dan pemegang saham kendali”.

Menurut Widjaja (2009:79), dewan komisaris independen adalah”..anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/ atau anggota dewan komisaris lainnya”.

Menurut Fakhruddin (2008:102) dewan komisaris adalah”...anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan”.

Berdasarkan definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan).

#### **2.1.1.5.1.2 Pengukuran Dewan Komisaris Independen**

Menurut Widjaja (2009:82) pengukuran dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Dewan komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris”.

Berdasarkan uraian diatas, rumus perhitungan dewan komisaris independen sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\sum \text{anggota dewan komisaris independen}}{\sum \text{anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Keterangan:

DKI = Dewan Komisaris Independen

### **2.1.1.5.2 Komite Audit**

#### **2.1.1.5.2.1 Pengertian Komite Audit**

Menurut KNKG (2006) dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia komite audit adalah: "...sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen".

Menurut Kep. 29/PM/2004 komite audit adalah: "...komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian".

Menurut IKAI (2010) komite audit adalah: "...salah satu unsur

kelembagaan dalam konsep *good corporate governance* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan serta mampu mengoptimalkan mekanisme *check and balances* yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya”.

*James A. Hall* dialihbahasakan oleh Dewi (2007:16) komite audit adalah”...pemeriksa dan penyeimbang yang independen untuk fungsi audit internal dan perantara dengan para auditor eksternal”.

Dari beberapa definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang membantu dewan komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektifitas internal dan eksternal audit.

#### **2.1.1.5.2.2 Pengukuran Komite Audit**

*James A Hall* dialihbahasakan oleh Dewi (2007:20) menyatakan bahwa: ”Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit diperusahaan”

Berdasarkan uraian di atas, rumus perhitungan komite audit adalah sebagai berikut:

$$KA = \sum \text{Anggota Komite audit di perusahaan}$$

Keterangan:

KA = komite audit

## 2.1.2 Ukuran Perusahaan

### 2.1.2.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar/kecilnya suatu objek. Perusahaan diartikan sebagai suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia (Ely Suhayati, 2009:9). Ukuran perusahaan sendiri merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Butar dan Sudarsi (2012) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai nilai yang menunjukkan besar/kecilnya perusahaan.

Menurut Scot (1981:235) dalam Torang (2012:93) definisi ukuran perusahaan yaitu:

“Ukuran organisasi merupakan suatu variabel konteks yang mengukut tuntutan pelayanan atau produk organisasi”.

Menurut Husnan (2007:45) definisi ukuran perusahaan yaitu:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain: total aktiva *log size*, nilai pasar saham dan lain-lain”.

Menurut Suwito dan Herawaty (2005:138) definisi ukuran perusahaanyaitu:

“Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, dimana ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*) dan perusahaan kecil (*small firm*)”.

Definisi ukuran perusahaan yang dikemukakan oleh Jogiyanto (2011:282)

yaitu:

“Ukuran perusahaan sebagai alogaritma dari total asset diprediksi mempunyai hubungan negative dengan rasio, kemudian perusahaan yang besar cenderung berinvestasi ke proyek yang mempunyai varian rendah, untuk menghindari laba ditahan.”

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ukuran perusahaan adalah indikator yang dikemukakan oleh Jogiyanto (2011:282) yaitu:

“Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva”.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala untuk menentukan besar/kecilnya suatu perusahaan.

### **2.1.2.2 Jenis-jenis Perusahaan**

Sukirno (2011:190) menjelaskan bahwa organisasi perusahaan dapat dibedakan kedalam tiga bentuk organisasi yang pokok, yaitu:

1. “Perusahaan perseorangan  
Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh 1 orang sehingga pemiliknya memiliki kebebasan yang tidak terbatas. Ia sepenuhnya menguasai perusahaan dan dapat melakukan apapun tindakan yang dianggapnya untuk menguntungkan usahanya.
2. Firma

Firma merupakan organisasi yang dimiliki oleh beberapa orang. Mereka sepakat untuk menjalankan suatu usaha dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Modal perusahaan berasal dari para anggotanya, adakalanya mereka juga meminjam modal dari lembaga-lembaga lain.

### 3. Perseroan terbatas

Perusahaan-perusahaan besar kebanyakan berbentuk perseroan terbatas. Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat mengumpulkan modal dengan mengeluarkan saham.”

Ketiga bentuk organisasi/perusahaan tersebut merupakan badan usaha swasta yang artinya didirikan oleh orang atau badan swasta. Bentuk organisasi/perusahaan tersebut bergerak pada kegiatan usaha yang berbeda-beda, sehingga bentuk perusahaan itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Menurut M. Nafarin (2009:14) perusahaan dapat dibagi menjadi lima kategori, yaitu:

1. “Perusahaan industri (*Industry company*)  
Perusahaan industri merupakan perusahaan yang mengolah suatu benda (bahan baku) menjadi produk (barang jadi) tertentu untuk dijual.
2. Perusahaan dagang (*Trading company*)  
Perusahaan ini membeli barang untuk dijual tanpa mengubah bentuk barang yang dibeli tersebut.
3. Perusahaan jasa (*Service company*)  
Perusahaan ini merupakan perusahaan yang menerima uang jasa dari kegiatannya asset (harta), tenaga untuk pelayanan kepada konsumen (pelanggan)
4. Perusahaan agraris (*Agrarian company*)  
Perusahaan agraris merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang hasilnya untuk dijual.
5. Perusahaan ekstraktif (*extractive company*)  
Perusahaan ekstraktif merupakan perusahaan yang mengambil (mengeksplorasi) kekayaan alam yang tersedia dengan maksud untuk dijual tanpa harus mengubah bentuk barang yang diambil tersebut.”

Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar yang berbeda-beda. Ketiga hal tersebut seringkali digunakan untuk mengidentifikasi ukuran suatu perusahaan. Ukuran perusahaan itu sendiri

merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil Asward dan lina (2015).

### **2.1.2.3 Metode Pengukuran Perusahaan**

Perusahaan memiliki total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar yang berbeda- beda. Ketiga hal tersebut seringkali digunakan untuk mengidentifikasi ukuran suatu perusahaan.

Menurut Prasetyantolo (2008:257):

“Aset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar aset biasanya perusahaan tersebut semakin besar”.

Menurut jogiyanto hartono (2013:282):

“Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva”.

Menurut bambang riyanto (2008:313)

“Besarnya kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan dan nilai aktiva”.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total aset, nilai pasar saham dan penjualan.

#### **2.1.2.4 Klasifikasi Ukuran Perusahaan**

UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan kedalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 diuraikan dalam table 2.1.

**Table 2.1**

**Kriteria Ukuran Perusahaan**

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Assets (Tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah	>500 juta – 10 M	2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia, saham yang dicatat dibuat atas dua papan pencatatan, yaitu papan utama dan papan pengembangan. Papan utama ditunjukkan untuk perusahaan tercatat yang berskala besar, sementara papan pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan yang belum memenuhi syarat pencatatan di papan utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum membukukan keuangan.

Peraturan Bursa Efek Indonesia menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk tercatat di papan utama adalah sebagai berikut:

“Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir memiliki Aktiva Berwujud Bersih (Net Tangible Assets) minimal Rp100.000.000.000,-“.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berkala besar menurut peraturan Bursa Efek Indonesia memiliki Aktiva Berwujud minimal Rp100.000.000.000.

### **2.1.2.5 Indikator Ukuran Perusahaan**

Menurut dalam menganalisis ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log (Total Asset)}$$

Ukuran perusahaan dihitung menggunakan Lagaritma dari total asset. Hal ini dikarenakan besarnya total aktiva masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim, untuk menghindari data yang tidak normal tersebut maka total asset perlu di logaritman. Total asset diperoleh dari laporan posisi keuangan.

### **2.1.3 Kepemilikan Manajerial**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Menurut Jansen (1986) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan akan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.

Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga dengan keterlibatan ini kedudukan manajer sejajardengan pemegang saham. Manajer diperlakukan bukan semata sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlakukan sebagai pemegang saham. Sehingga diharapkan adanya keterlibatan manajer pada kepemilikan saham dapat efektif untuk meningkatkan kinerja manajer.

Menurut Imanta dan Satwiko (2011:68) kepemilikan managerial adalah :

”Merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manager atau dengan kata lain manager juga sekaligus sebagai pemegang saham”

Menurut Faizal (2011) kepemilikan manajerial adalah :

“Tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki manajer pada akhir tahun yang dinyatakan dalam %(persen)”

Jadi, dengan kata lain kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh manajer yang dinyatakan dalam % sehingga manajer sekaligus sebagai pemegang saham.

### 2.1.3.2 Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Jensen dan Meckling dalam Kawatu (2009) pengukuran kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut:

“Jumlah saham direktur dan komisaris dibagi jumlah saham beredar”.

Berdasarkan uraian di atas, rumus kepemilikan manajerial sebagai berikut:

$$KM = \frac{\sum \text{Saham yang dimiliki Direktur dan Dewan Komisaris}}{\sum \text{Saham Perusahaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

KM = Kepemilikan Manajerial

## 2.1.4 Manajemen Laba

### 2.1.4.1 Pengertian Manajemen Laba

Beberapa pandangan mengenai manajemen laba dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah Davidson, Stickney, dan Weil, Schipper (1989), National

Association of Fraud Examiners (1993), Fisher dan Rozenweig (1995), Lewit (1998), serta Healy dan Wahlen (1999) dalam (Sri Sulistyanto, 2008).

Davidson, Stickney, dan Weil (1988) dalam Sri Sulistyanto, (2008:48) menyatakan bahwa:

*“Earning management is the process of taking deliberate step within the constrains of generally accepted accounting principles to bring about desired level of reported earnings (Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan”.*

Schipper (1989) dalam Sri Sulistyanto (2008:49), menyatakan bahwa:

*“Earnings management is a purpose intervention in the external finanacial reporting process, with the intent of obtaining some private gain a opposed to say, Merely facilitating the neutral operation of the process (Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan ujuan untuk memeperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses)”.*

*National Association of Certified Fraud Examiners* (1993) dalam Sri Sulistyanto, (2008:49) menjelaskan:

*“Earning management is the intentional, deliberate, misstatement or omission of material facts, or accounting data, wich is misleading and, whwn considerate with all the information made available, would couse the reader to change or alter his or judgment or decision (Manajemen laba adalah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang*

memecahnya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya).”

Fisher dan Rosenweig (1995) dalam Sri Sulistyanto (2008:49), menyatakan bahwa:

*“Earnings management is a action of a manager which serve to increase (decrease) current reporten earnings of the unit wich the manager is responsible without generating a corresponding increase (decrease) in long term economic profitability of the unit (Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan keuntungan (penurunan) ekonomi perusahaan jangka panjang)”*.

Lewit (1998) dalam Sri Sulistyanto (2008:50), menyatakan bahwa:

*“Earnings management is flexibility in accounting allows it to keep pace with business innovation. Absuses such as earnings accour when people exploit this pliancy. Trikery is employed to abscur actual financial volatility. This is trun, make the true consequences of management decisions (Manajemen laba adalah fleksibilitas akuntansi untuk menyetarakan diri dengan inovasi bisnis. Penyalahgunaan laba ketika public memeanfaatkan hasilnya. Itu semua untuk menutupi konsekuensi dari keputusan-keputusan manajer).”*

Healy dan Wahlen (1999) dalam Sri Sulistyanto (2008:50), menyatakan bahwa:

*“Earnings management accours when managers uses judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about underlying economics performance of the company or to ingluence contractual aoutmes that depend on the reported accounting numbers (Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan stakeholders yang ingin mengetahui kinerja ekonomi*

yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu”.

Scott dalam Rahmawati (2008) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua, yaitu:

1. “Melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan *political costs (Opportunistic Earning Management)*.”
2. Memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting (Efficient Earning Management)*, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak”.

Manajemen laba memiliki banyak definisi. Tidak ada konsensus tentang definisi tunggal mengenai manajemen laba. Namun dalam konteks penelitian ini, manajemen laba dipandang sebagai perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer.

#### **2.1.4.2 Jenis dan Teknik Manajemen Laba**

Menurut Subramanyam (2012:131), terdapat tiga jenis strategi manajemen laba, yaitu:

1. “Manajer meningkatkan laba (*increasing income*)  
Salah satu strategi manajemen laba adalah meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode
2. *Big Bath*  
Strategi *big bath* dilakukan melalui penghapusan (*write-off*) sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode

dengan kinerja yang buruk (seringkali pada masa resesi dimana perusahaan lain juga melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa saat terjadi suatu kejadian yang tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger atau restrukturisasi. Strategi *big bath* juga sering kali dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada periode sebelumnya.

### 3. Perataan laba.

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini, manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode baik dengan menciptakan cadangan atau "bank" laba dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk. Banyak perusahaan menggunakan bentuk manajemen laba ini."

Menurut Sri Sulistyanto (2008:83) ada beberapa bentuk rekayasa laba yang sering dilakukan pihak manajemen agar laba yang dilaporkan sesuai dengan yang dikehendaki yaitu:

#### 1. *"Taking a Bath*

Disebut juga *big baths*, bisa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya pergantian direksi. Bila teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan bila kondisi tidak menguntungkan tidak bisa dihindari. Akibatnya laba pada periode yang akan datang menjadi tinggi meski kondisi sedang tidak menguntungkan.

#### 2. *Income Minimization*

Cara ini hampir sama dengan *taking a bath* namun tidak ekstrim. Cara ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud mengurangi kemungkinan munculnya biaya politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan barang modal dan aktiva tidak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, serta pembebanan biaya riset.

#### 3. *Income Maximization*

Maksimalisasi laba bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar. Selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran terhadap kontrak hutang jangka panjang.

#### 4. *Income Smoothing*

Perusahaan cenderung lebih memilih untuk melaporkan trend pertumbuhan laba yang stabil dari pada perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis. Perataan laba dapat dicapai dengan suatu ketentuan yang tinggi untuk hutang dan bertentangan dengan nilai asset pada tahun yang baik sehingga ketentuan itu dapat dikurangi. Hal ini dapat mempengaruhi laba yang dilaporkan pada masa yang buruk.

#### 5. *Timing Revenue and Expense Recognition*

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi. Misalnya pengakuan premature atas pendapatan.”

Setiawati dan Na'im (2000) dalam Rahmawati dan Qomariyah (2006)

menyebutkan 3 manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

1. “Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi  
Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgment (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, dan lain-lain.
2. Mengubah metode akuntansi  
Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan.  
Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.”

#### **2.1.4.3 Motivasi Manajemen Laba**

Menurut Subramanyam (2012:132), insentif utama untuk melakukan manajemen laba adalah:

1. “Insentif perjanjian.  
Banyak perjanjian yang menggunakan angka akuntansi. Misalnya perjanjian kompensasi manajer yang biasanya mencakup bonus berdasarkan laba. Perjanjian bonus biasanya memiliki batas atas dan batas bawah, artinya manajer tidak mendapatkan bonus jika lebih rendah dari batas bawah dan tidak mendapatkan bonus tambahan saat laba lebih tinggi dari batas atas. Contoh lain insentif perjanjian adalah persyaratan hutang yang biasanya berdasarkan rasio yang menggunakan angka akuntansi seperti laba.
2. Dampak Harga Saham

Manajer dapat meningkatkan laba untuk menaikkan harga saham perusahaan sementara sepanjang satu kejadian tertentu seperti merger yang akan dilakukan atau penawaran surat berharga, atau rencana untuk menjual saham atau melaksanakan opsi. Manajer juga melakukan perataan laba untuk menurunkan persepsi pasar akan resiko dan menurunkan biaya modal. Salah satu insentif manajemen laba yang terkait lainnya adalah untuk melampaui ekspektasi pasar.

3. Insentif lain

Laba seringkali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian yang dilakukan badan pemerintah, misalnya untuk ketaatan undang-undang anti monopoly dan IRS. Selain itu perusahaan dapat menurunkan laba untuk memperoleh keuntungan dari pemerintah, misalnya subsidi atau proteksi dari pesaing asing. Perusahaan juga menurunkan laba untuk mengelakan permintaan serikat buruh. Salah satu insentif manajemen laba lainnya adalah perubahan manajemen yang sering menyebabkan *big bath*.”

Sri Sulistyanto (2008:63) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba:

1. *“Bonus Scheme Hypothesis*

Kompensasi (bonus) yang didasarkan pada besarnya laba yang dilaporkan akan memotivasi manajemen untuk memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan keuntungan yang dilaporkan demi memaksimalkan bonus mereka. Bonus minimal hanya akan dibagikan jika laba mencapai nilai tertentu atau lebih besar.

2. *Contracting Incentive*

Motivasi ini muncul ketika perusahaan melakukan pinjaman hutang yang berisikan perjanjian untuk melindungi kreditur, seperti *dividen* yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja atau laporan ekuitas berada dibawah tingkat yang ditetapkan, yang semuanya dapat meningkatkan risiko bagi kreditur, karena pelanggaran perjanjian dapat mengakibatkan biaya yang tinggi sehingga manajer perusahaan berharap untuk menghindarinya. Jadi, manajemen laba dapat muncul sebagai alat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian dalam kontrak hutang.

3. *Political Motivation*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

4. *Taxation Motivation*

Perpajakan merupakan motivasi yang paling jelas untuk melakukan manajemen laba. Manajemen berusaha untuk mengatur labanya agar

pembayaran pajak lebih rendah dari yang seharusnya sehingga didapat penghematan pajak.

5. *Incentive Chief Executive Officer (CEO)*

CEO yang mendekati masa pension akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

6. *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang akan *go public* belum tentu memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.”

#### 2.1.4.4 Pendeteksian Manajemen Laba

Beneish (2001) dalam Restuwulan (2013) menyatakan bahwa terdapat tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mendeteksi adanya praktek manajemen laba:

1. “Pendekatan yang mengkaji akrual agregat dan menggunakan metode regresi untuk menghitung akrual yang diharapkan dan yang tidak diharapkan.
2. Pendekatan yang menekankan pada akrual spesifik seperti cadangan utang ragu-ragu atau akrual pada sektor spesifik seperti tuntutan kerugian pada industri asuransi.
3. Pendekatan yang mengkaji ketidaksinambungan dalam pendistribusian pendapatan”.

Dari ketiga pendekatan di atas, pendekatan yang pertama yang lebih banyak digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya manajemen laba dengan menghitung total akrual.

Menurut Sri Sulistyanto (2008:216) model Empiris bertujuan untuk mendeteksi manajemen laba, pertama kali dikembangkan oleh *Healy, De Angelo*, model *Jones* serta model *Jones* dengan modifikasi.

## 1. Model *Healy*

Model empiris untuk mendeteksi manajemen laba pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985.

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi (*cash flows from operation*) untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = \text{Net Income} - \text{Cash flows from operation}$$

Langkah II: Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* (NDA) yang merupakan rata-rata total accrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = \frac{\sum TA_t}{T}$$

Keterangan: *NDA* = *Nondiscretionary Accruals*.

*TAC* = Total akrual yang diskala dengan total aktiva periode *t-1*.

*T* = 1,2,...,T merupakan tahun *subscript* untuk tahun yang dimasukan dalam periode estimasi.

*T* = Tahun *subscript* yang mengindikasikan tahun dalam periode estimasi.

Langkah III: menghitung nilai *discretionary accruals* (DA) yaitu selisih antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA).

$$DA = TAC - NDA$$

## 2. Model *De Angelo*

Model lain mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh De Angelo pada tahun 1986.

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi (*cash flows from operation*) untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = \text{Net Income} - \text{Cash flows from operation}$$

Langkah II: Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* yang merupakan rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$NDA_t = TAC_{t-1}$$

Keterangan:  $NDA_t$  = *Descretionary accruals* yang diestimasi.

$TAC_t$  = Total akrual periode  $t$ .

$TA_t$  = Total aktiva periode  $t-1$ .

Langkah II: Menghitung nilai menghitung nilai *discretionary accruals* (DA) yaitu antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA).

$$DA = TAC - NDA$$

## 3. Model *Jones*

Model *Jones* dikembangkan oleh *Jones* (1991), ini tidak lagi menggunakan asumsi bahwa *nondiscretionary accruals* adalah konstan.

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi

(*cash flows from operation*) untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = \text{Net Income} - \text{Cash flows from operation}$$

Langkah II: Menghitung nilai *nondiscretionary accruals* sesuai dengan rumus di atas dengan terlebih dahulu melakukan regresi linier sederhana.

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = b_0 \left[ \frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + b_1 \left[ \frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + b_2 \left[ \frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \Sigma$$

Semua nilai di atas diregresikan dengan menggunakan  $\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$  sebagai

Variabel dependen, sedangkan  $\frac{1}{TA_{i,t-1}}$ ,  $\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$  dan  $\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}}$  sebagai variabel independen. Regresi

terhadap keempat komponen ini menghasilkan nilai  $b_1$ ,  $b_2$  dan  $b_3$  yang digunakan untuk menghitung nilai *nondiscretionary total accruals* (NDA) dihitung sebagai berikut:

$$NDA_{i,t} = b_0 \left[ \frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + b_1 \left[ \frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + b_2 \left[ \frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right]$$

Keterangan:  $Sales_{i,t}$  = Perubahan penjualan

$TR_{i,t}$  = Perubahan piutang dagang

Langkah III: Menghitung nilai *discretionary accruals* (DA) yaitu antara total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDA).

$$DA = TAC - NDA$$

#### 4. Model Jones Modifikasi

Model *Jones* dimodifikasi merupakan modifikasi dari model *Jones* dalam Sri Sulistyanto (2008:227), yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan

untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan.

Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi (*cash flows from operation*) untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC = Net\ Income - Cash\ flows\ from\ operation$$

Langkah II: Menghitung nilai *accruals* yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*)

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = b_0 \left[ \frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + b_1 \left[ \frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + b_2 \left[ \frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + \Sigma$$

Keterangan:  $TA_{i,t}$  = Total akrual periode t

$Sales_{i,t}$  = Perubahan penjualan

$PPE_{i,t}$  = Aktiva tetap (*gross property plant and Equipment*)

Langkah III: Menghitung nilai *nondiscretionary total accruals* (NDTA) dihitung sebagai berikut:

$$NDTA_{i,t} = b_0 \left[ \frac{1}{TA_{i,t-1}} \right] + b_1 \left[ \frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TRI_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right] + b_2 \left[ \frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right]$$

Keterangan:  $TR_{i,t}$  = Perubahan piutang dagang

Langkah IV: Menghitung nilai menghitung nilai *discretionary accruals* (DA) yaitu selisih total akrual (TAC) dengan *nondiscretionary total accruals* (NDTA).

$$DTA = TAC - NDTA$$

Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan selalu melakukan manajemen laba dalam mencatat dan menyusun laporan keuangannya. Nilai nol menunjukkan

manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba (*income smoothing*) sedangkan nilai positif menunjukkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan pola kenaikan laba (*income increasing*) dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba (*income decreasing*).

Menurut Arifa (2002) dalam Muid (2005) untuk mendeteksi apakah perusahaan melakukan manajemen laba dalam laporan keuangannya digunakan rumus *total accruals* sebagai berikut:

$$TAC_{PT} = NOI_{PT} - CFFO_{PT}$$

Keterangan:  $TAC_{PT}$  = *Total Accruals* periodetes

$NOI_{PT}$  = *Net Operating Income* pada periode tes

$CFFO_{PT}$  = *Cash Flow from Operations* pada periode tes

Menurut Healey dan De Angelo (Scott 1997) dalam Arifa (2002), *total accruals* terdiri dari *discretionary* dan *non discretionary accruals*. *Total accruals* digunakan sebagai indikator, sebab *discretionary accruals* (DAC) sulit untuk diamati, karena ditentukan oleh kebijakan masing-masing manajer.

Friedlan (Arifa 2002) merumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$DAC_{PT} = (TA_{PT} / Sales_{PT}) - (TA_{PD} / Sales_{PD})$$

Keterangan:  $DCA_{pt}$  = *discretionary accruals* periode tes

$TA_{pt}$  = *total accruals* pada periode tes

$Sales_{pt}$  = penjualan pada periode tes

$TA_{pd}$  = *total accruals* pada periode dasar

$Sales_{pd}$  = penjualan pada periode dasar

Adanya manajemen laba ditandai dengan DAC positif dan apabila DAC bernilai negatif berarti tidak terdapat manajemen laba.

### 2.1.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh *corporate governance*, ukuran perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap manajemen laba diantaranya dikutip dari beberapa sumber dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2.2**

#### Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Nuryaman (2008)	Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Laba	1) Konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba  2) komposisi dewan komisaris dan spesialisasi industri KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.	- Mekanisme <i>corporate governance</i> yang diteliti dalam penelitian ini hanya komisaris independen sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menambahkan komite audit.
Gagaring Panggalung (2011)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia.	- Pelaksanaan <i>corporate governance</i> melalui kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen, dan jumlah pertemuan	- Proksi pelaksanaan <i>corporate governance</i> pada penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		<p>komite audit mempunyai pengaruh negative signifikan terhadap manajemen laba. Disisi lain kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan dewan komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba.</p> <p>-Ukuran perusahaan mempunyai hubungan negative signifikan terhadap manajemen laba. <i>Leverage</i> tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.</p>	<p>Independen dan jumlah pertemuan komite audit. Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset.</p> <p>-Penambahan variabel independen yaitu struktur kepemilikan.</p>
Dian Agustia (2012)	Pengaruh Faktor <i>Good Corvornance Governance, Free Cash Flow</i> , dan <i>Leverage</i> Terhadap manajemen Laba.	<p>Semua komponen <i>good corvornance</i> (ukuran komite audit, proporsi komite audit independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh, <i>free cash flow</i> berpengaruh negative dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini berarti perusahaan dengan <i>free cash flow</i> yang</p>	<p>Menggunakan ukuran komite audit, proporsi komite audit independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai komponen <i>good corporate governanace</i> sementara dalam penelitian yang akan dilakukan struktur kepemilikan manajerial maupun institusional tidak termasuk dalam</p>

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		tinggi akan membatasi praktek manajemen laba.	komponen <i>corporate governance</i> .
Arri Wiryadi dan Nurzi Sebrina (2013)	Pengaruh Asimetri Informasi, Kualitas Audit, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba.	Asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)  Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)  Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Perubahan variabel independen yaitu ukuran perusahaan dan <i>corporate governance</i>

Sumber: Hasil Pengolahan (2016)

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba**

Menurut Achmad Afnan (2014) dalam Nuriyatun Fauziah (2014) semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, pengawasan terhadap laporan keuangan akan lebih ketat dan objektif, sehingga kecurangan yang dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi laba dapat diminimalisir dan manajemen laba dapat dihindari. Terkait dengan manajemen laba, komisaris independen tidak berkaitan langsung dengan perusahaan yang mereka tangani, karena mereka bertugas untuk mengawasi direksi perusahaan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, sehingga pekerjaan yang dilakukannya murni tanpa ada campur tangan dari pihak manapun.

Menurut Muhammad Dzulfikar (2015) dalam Vidya Fariza (2010) pentingnya dewan komisaris independen adalah untuk mengurangi tindakan manajemen dalam melakukan manajemen laba. Semakin banyak komisaris independen maka pengawasan terhadap kebijakan manajemen juga akan bertambah banyak, dan manajemen akan lebih memperhatikan kepentingan perusahaan daripada kepentingannya sendiri sehingga manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen juga akan berkurang.

Menurut Vafeas (2000) dalam Bimo Bayu Aji (2012) peranan dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Dengan banyaknya jumlah dewan komisaris yang ada maka diharapkan dapat meningkatkan *corporate governance* sehingga manajemen laba juga diharapkan akan menjadi semakin menurun.

Menurut Xie et. Al (2003) dalam Vidya Fariza (2010) dewan komisaris independen dengan latar belakang bidang keuangan akan mencegah manajemen laba.

Menurut Pensnell et. Al (1998) dalam Vidya Fariza (2010) keberadaan dewan komisaris independen membatasi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Hal ini sesuai dengan penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007); Veronica dan Utama (2005); Welfin I Guna dan Arleen Herawaty (2010) terbukti bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba namun bertentangan dengan penelitian Nasution dan Setiawan (2007); Pratana dan Mas'ud (2003); Cornett (dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007) bahwa dewan komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.

### **2.2.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba**

Menurut Siallagan dan Machfoedz (2006) dalam Muchamad Danu Septiyanto (2012) komite audit bertanggung jawab mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal, dapat mengurangi sifat oportunistik manajemen yang melakukan manajemen laba dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.

Menurut Xie, Davidson dan Dadalt (2003) dalam Muchamad Danu Septiyanto (2012) komite audit yang berasal dari luar mampu melindungi

kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen.

Menurut Carcello (2006) dalam Heti Tresnawati (2011) komite audit dibidang keuangan terbukti efektif mengurangi tindakan manajemen dalam melakukan manajemen laba.

Hal ini sesuai dengan penelitian Heti Tresnawati (2011); Xie (dalam Budi Susilo, 2010); Siallagan dan Machfoedz (dalam Bayu Fatma Widiatmaja, 2010); Nasution dan Kurniawan (2007) terbukti bahwa komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba namun bertentangan dengan penelitian Veronica dan Utama (2005); dan Halima Sathila Palestin (2014) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

### **2.2.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba**

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar perusahaan dan luasan usahanya mengakibatkan pemilik tidak bisa mengelola sendiri perusahaannya secara langsung. Hal inilah yang memicu munculnya masalah keagenan. Perusahaan yang berukuran besar memiliki kecenderungan melakukan tindakan manajemen laba lebih kecil dibandingkan perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar, baik oleh investor, kreditor, pemerintah maupun masyarakat.

Sri Sulistyanto (2008:208) menyatakan bahwa:

“Perusahaan besar akan lebih diperhatikan oleh pihak luar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Para manager yang mengelola perusahaan besar tidak termotivasi untuk melakukan rekayasa dalam laporan keuangannya dan memilih untuk mengutamakan kepentingan pemegang saham, sedangkan perusahaan kecil lebih leluasa untuk mengubah laporan keuangannya karena kurangnya perhatian dari pihak luar”.

Santi (2008) dalam Restu Agustini dan Tyas Pramesti (2009) menyatakan bahwa:

“Perusahaan yang besar mempunyai insentif yang cukup besar untuk melakukan manajemen laba, karena salah satu alasan utamanya adalah perusahaan besar harus mampu memenuhi ekspektasi dari investor atau pemegang sahamnya. Semakin besar perusahaan, semakin banyak estimasi dan penilaian yang perlu diterapkan untuk tiap jenis aktivitas perusahaan yang semakin banyak”.

Menurut Watts&Zimmerman (1978) dalam Restu Agustini dan Tyas Pramesti (2009) menyatakan bahwa:

“Dukungan maupun penentangan terhadap suatu rencana standar akuntansi bergantung pada ukuran perusahaan (menurut nilai aktiva) dan dampaknya terhadap peningkatan atau penurunan laba yang dilaporkan”.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Restu Agustini dan Tyas Pramesti (2009), Desmiyawati, Narizal dan Yessi Fitriana (2009) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan positif dengan manajemen laba.

#### **2.2.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba**

Menurut Bayu Fatma Widiatmaja (2010) dalam Heti Tresnawati (2011) dengan memperbesar kepemilikan manajerial diharapkan dapat mengurangi

tindakan manajemen laba yang tercermin dari berkurangnya nilai *discretionary accruals*. Besarnya kepemilikan manajerial diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan laba yang dihasilkan.

Menurut Shleifer *and* Vishny (1997) dalam Jao (2011) kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat.

Menurut Madiastuty dan Machfoedz (2003) dalam Fitri Listiani (2015) kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat diterapkan dalam membatasi perilaku oportunistik manajer dalam bentuk manajemen laba.

Menurut Siallagan dan Machfoedz (2006) dalam Fitri Listiani (2015) kepemilikan manajerial mempengaruhi kualitas laba. Semakin besar kepemilikan manajerial maka *discretionary accruals*-nya akan semakin rendah sehingga praktek manajemen laba semakin berkurang.

Boediono (2005) dalam Arry dan Nurzi (2013) menyatakan bahwa:

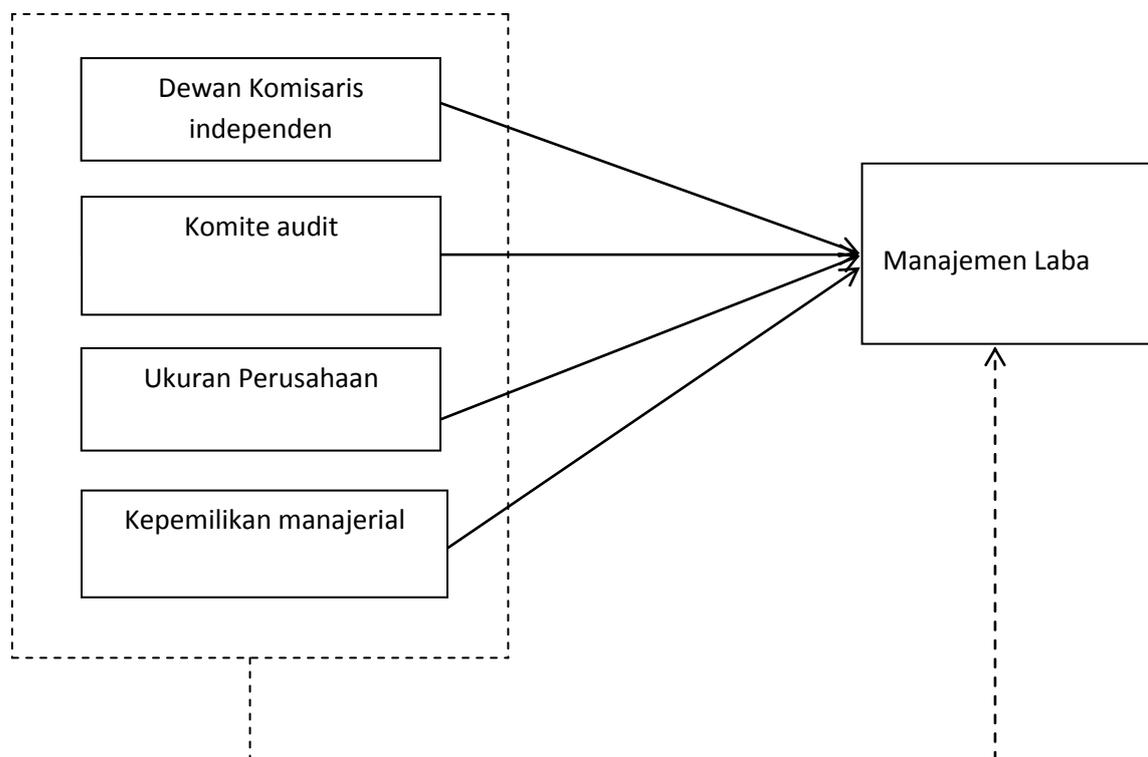
“Kepemilikan manajerial sangat menentukan terjadinya manajemen laba, karena kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung akan mempengaruhi tindakan manajemen laba”.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ujijantho dan Pramuka (2007); Jensen dan Meckling (1976); Dhaliwal *et al.* (1982); Morck *et al.* (1988); Pratana dan Mas'ud (2003) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba namun bertentangan dengan penelitian Budi

Susilo (2010); Boediono (2005); Welfin I Guna dan Arleen Herawaty (2010) yang menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan juga didasari oleh penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.

Dari kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan alur hubungan antar variabel yang diteliti dalam paradigma dalam gambar 2.1 sebagai berikut :



**Gambar 2.1**

**Skema Kerangka Pemikiran**

### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2013:64) dalam penelitian hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Penulisan skripsi ini menggunakan perumusan atas hipotesis untuk membuat pernyataan yang akan mewakili pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, rumusan hipotesis penelitian yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap manajemen laba.
2. Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba.
3. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba.
4. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba.